



PERUBAHAN SOSIAL DAN TANTANGAN BUDAYA

Studi Kasus pada Masyarakat Teluk Bintuni¹

Albertus Heriyanto



48

Abstract: Changes in social and political structure, economic system, moral order, or religious system usually have a wide impact on the life of the community such as culture shock, loss of their identity, and social conflicts. Community, however, might see the changes as a challenge against which various potential strengths can be developed, and a new identity may be formed as the community undergoes the process of changes.

People in Bintuni Bay in the Bird's Head of West Papua, are still striving to find a way out from difficult situation in which they find themselves in transition: from traditional life to modernity, from homogeneity to plurality, from freedom and composure under the aegis of nature to an exploitative and capitalistic system. "Can they find the way out?"

Keywords. Perubahan sosial • Tradisi • Modernitas • Legitimasi • Identitas • Otoritas

¹ Bagian pertama tulisan ini diangkat dan disarikan dari hasil penelitian mahasiswa-mahasiswi STFT Fajar Timur angkatan 1999 yang mengadakan penelitian tentang sikap umat katolik pribumi di Teluk Bintuni terhadap perubahan-perubahan yang mereka alami.



Perubahan-perubahan dalam Masyarakat²

Teluk Bintuni merupakan wilayah pesisir yang terletak di dagu/leher burung pada peta Bumi Cenderawasih, Papua. Secara keseluruhan Teluk Bintuni merupakan dataran rendah dengan hutan dan rawa bakau yang luas. Hubungan antara satu kampung dengan kampung yang lain umumnya hanya dapat dilakukan melalui sungai. Dari sisi demografis, wilayah ini dulunya hanya didiami oleh penduduk asli yang terdiri atas 7 sub-suku yang hidup terpecah di berbagai kampung, yakni suku Wamesa, Iraputu, Sebiar, Sumuri, Soub, Kuri dan Moskona. Seiring perkembangan zaman, dengan semakin banyaknya pedagang, pekerja perusahaan ikan, udang, kayu serta gas alam, kaum transmigran, guru serta pegawai pemerintahan, perjumpaan dengan suku-suku lain pun tak terelakkan. Kini, kota-kota kecil Bintuni dan Babo, serta kampung-kampung di rimba rawa tersebut telah menjadi wilayah multi etnis.

Bila kita menilik kehidupan masyarakat dengan berbagai perubahan yang mereka alami, muncul kesan yang mendalam akan pergumulan mereka dalam kehidupan yang semakin tidak bersahabat. Keheningan kampung dan kebersatuan dengan alam, keakraban dengan sesama dalam ikatan kekeluargaan yang teduh mengayomi dan menenteramkan nampaknya makin menjauh. Perubahan alam-fisik terjadi di berbagai segi, pergeseran tata nilai pun mengiringi. Banyak hal yang dahulu tidak ada sekarang dapat dengan mudah ditemui, dan banyak hal yang dahulu menjadi tabu adat, sekarang hanya dapat diterima sebagai kewajaran atau kadang dimaklumi dengan tatapan keprihatinan. Sejumlah aturan adat yang dirasa membelenggu, kini oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang sewajarnya tidak perlu ada lagi, tapi seiring dengan itu batas-batas baik dan buruk dalam

² Perubahan dalam masyarakat merupakan suatu proses yang terjadi terus-menerus, bisa cepat, bisa lambat, bisa terencana bisa juga spontan. Dalam tulisan ini kami menetapkan sebagai titik perbandingan dalam perubahan itu: tradisional dan modern, dengan sedikit mengabaikan kapan saat perubahan itu terjadi, karena memang sulit sekali menjadi titik balik yang pasti. Dengan kebudayaan tradisional kami maksudkan suatu tata masyarakat yang masih bersifat tertutup, masih tunduk pada seperangkat pemikiran dan nilai yang diwariskan, diyakini dan dihayati secara turun-temurun. Kesan yang lekat dengan tradisionalitas ialah bahwa orang selalu berupaya mempertahankan adat, mitis, kurang kritis, konservatif. Dengan kebudayaan modern, kami maksudkan suatu tata masyarakat yang bersifat terbuka, selalu bersikap positif terhadap perubahan, dan cenderung suka menerima yang baru. Kemodernan sering diidentikkan dengan kedekatan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kritis, metodis, sistematis, analitis, logis, rasional. (Bdk. Simanjuntak, SH, Drs. B., "Patologi Sosial", . 24 – 25)



masyarakat semakin kabur. Tata sopan santun dan kesusilaan nampak sedang mencari lagi tempat berpijaknya.

Kegamangan dalam melangkah pun makin terasa. Kaum tua, terlebih yang pernah sangat berperan dalam adat, berusaha untuk mempertahankan adat dan tradisi. Namun mereka pun ragu, nilai adat mana yang sungguh dapat mereka kedepankan dan tawarkan. Sementara itu, kaum muda merasa lebih cocok dengan segala yang baru, meski nampak juga bahwa tiada pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai baru yang sedang atau hendak mereka jalani. Kaum tua menatap masa lampau dengan keprihatinan romantiknya, sementara yang lain menganggapnya sebagai kenangan lama yang memang sudah sewajarnya ditinggalkan.

Hubungan kekeluargaan antara anggota masyarakat yang tadinya erat, nampak makin longgar. Pengaruh individualisme pun mulai merasuk. Memang belum merombak pola perilaku, tapi sekurang-kurangnya mulai menempatkan orang-orang muda pada persimpangan jalan. Di satu pihak mereka masih merasa pentingnya relasi-relasi kekeluargaan, solidaritas, tenggang-rasa, namun di lain pihak merasa tidak mau lagi dikekang dan dibelenggu olehnya.

Dalam kehidupan sosial ekonomi penduduk asli sekarang ini sebagian besar mencari nafkah secara tradisional dan hanya sedikit yang bekerja sebagai buruh perusahaan atau pegawai pemerintahan serta guru. Mereka mencari nafkah secara tradisional, meramu, berkebun seadanya, atau mencari ikan/udang/kepiting di sungai/laut. Untuk memperoleh kebutuhan yang tidak dihasilkan sendiri, mereka melakukan pertukaran (barter) dengan sesamanya, entah orang sekampung atau pun dengan orang dari kampung yang lain. Namun dengan masuknya para pendatang, baik pedagang, pegawai pemerintah, maupun pekerja di perusahaan-perusahaan kayu, ikan, udang dan sebagainya, mereka pun mulai berkenalan dengan alat tukar-menukar (uang), pasar, serta bidang-bidang kerja yang beraneka ragam. Sekarang sebagian kaum pribumi bekerja sebagai buruh di perusahaan udang atau kayu, mencari udang untuk dijual ke perusahaan, serta menjadi pegawai atau guru.

Perubahan dalam pola ekonomi, terutama dengan beralihnya dari sistem barter ke ekonomi uang sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Kebutuhan harian yang dulunya diperoleh dari alam sekitar atau pun barter dengan sesamanya, kini sebagian besar hanya bisa diperoleh dengan membeli. Perubahan tersebut selanjutnya berpengaruh pula terhadap pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Sebagaimana umumnya kehidupan dalam suatu masyarakat di mana pasar menyediakan aneka kebutuhan, dan uang menjadi alat tukar untuk memperolehnya, mereka pun masuk dalam arus di mana pasar terus-menerus 'menggoda' dengan sekian banyak daftar kebutuhan, dan manusia 'dipaksa' untuk memenuhi kebutuhan tersebut.





Godaan-godaan tersebut bagi kebanyakan orang hanya dapat diterima sebagai sesuatu yang memang tak terhindarkan, harus dipenuhi, dan menuntut mereka untuk bekerja lebih keras mencari uang. Menurut mereka - dan sejumlah kenyataan memang menunjukkan demikian - tanpa uang sulit untuk hidup dalam tata ekonomi yang 'baru' ini; dan sebagai kelompok masyarakat yang belum lama hidup dalam sistem ekonomi uang, memperoleh dan terlebih lagi mengelola uang bagi mereka merupakan hal yang tidak mudah.

Kenyataannya tata ekonomi uang ini menempatkan kebanyakan masyarakat pribumi hidup dalam kondisi miskin. Ini sungguh sebuah ironi, karena masyarakat sebenarnya hidup di tengah alam raya yang kaya. Hutan-hutan adat menyimpan pohon sagu dan aneka macam bahan makanan, serta kayu yang tinggi nilai jualnya. Laut menyimpan aneka macam ikan dan udang. Tanah berawa warisan leluhur pun menyimpan minyak dan gas yang kini menjadi incaran para pemilik modal dan penguasa teknologi. Namun, zaman berubah, komposisi penduduk berubah, struktur kekuasaan berubah ... dan mereka yang dulu adalah tuan tanah, bagian integral dari rumah semestanya, kini seolah terasing, tidak memiliki kuasa yang cukup besar untuk menentukan untuk apa segala kekayaan itu.³

Perubahan dalam tata ekonomis ini pada gilirannya juga mengantar masyarakat dari kehidupan tradisional yang spiritual religius ke orientasi khas masyarakat modern kapitalis yang ekonomis materialistik. Kehidupan masyarakat tradisional di Teluk Bintuni, sebagaimana halnya masyarakat mitis, sangat kental dengan nuansa religius. Kepercayaan akan roh-roh, kekuatan-kekuatan gaib, praktek-praktek magi dan sejenisnya sangat menjiwai pola tindak mereka. Hampir tidak ada kegiatan hidup yang tidak dikaitkan dengan 'yang gaib'. Namun landasan bagi kedalaman hidup ini kini sedang dalam proses memudar, seiring dengan merekahnya orientasi baru dalam kehidupan 'modern' yang bercorak ekonomis-materialistik. Aspek kedalaman redup, berganti dengan kedangkalan.

Dalam tata politik, hal yang paling nampak ialah pergeseran dalam struktur kekuasaan/kepemimpinan masyarakat. Masuknya para pendatang,

³ Sesungguhnya sejak abad ke-19 kaum sosialis dan anarkis telah melihat buruknya pengaruh ekonomi uang bagi perkembangan peradaban. Peralihan dari sistem ekonomi tradisional (barter) ke ekonomi pasar di mana uang memegang peranan penting, juga berdampak besar pada pola hubungan antar manusia. Russell menulis mengenai hal ini berkaitan dengan kritik kaum sosialis dan anarkis terhadap dunia kapitalistik seiring dengan berkembangnya peran uang: perbudakan antar manusia demi penumpukan modal, ataupun perbudakan manusia terhadap dirinya sendiri karena besarnya nafsu memiliki dan menimbun kekayaan. Lih. Russell, Bertrand, "*Roads to Freedom*", 1977, bab 1 dan 2.

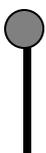


sejak zaman Kesultanan Tidore, masuknya Gereja sekitar akhir abad ke-19, dan pemerintahan Belanda maupun Republik Indonesia, telah membawa perubahan besar terhadap peran kepemimpinan dalam masyarakat. Tata kepemimpinan adat yang sebelumnya sangat berperan, semakin tergeser oleh struktur kepemimpinan pemerintah dan agama. Tokoh-tokoh adat yang sebelumnya sangat dominan dalam menentukan arah hidup masyarakat, kini harus tunduk pada tokoh-tokoh baru yang sebagian besar 'orang asing'.

Selain itu, seiring dengan munculnya bentuk pengetahuan baru melalui sekolah-sekolah terbentuklah suatu otoritas intelektual dan peran baru dalam tata masyarakat. Kalau sebelumnya yang mendominasi adalah orang tua-tua, khususnya mereka yang tahu adat dan secara tradisional berhak untuk mengambil peran tertentu, perkembangan berikutnya ialah munculnya para pendatang dan generasi muda dengan tingkat pendidikan tertentu yang membutuhkan pengakuan tersendiri. Di sisi lain, suatu masyarakat dengan komposisi yang makin heterogen, dengan tingkat kompleksitas masalah yang sangat berbeda dari masyarakat tradisional, memang membutuhkan suatu cara pengelolaan yang lain. Dampaknya: adat dan para pemimpinnya makin tersisih, digantikan dengan pola serta generasi pemimpin yang baru. Masalah psikologis yang terbenam dalam diam ialah hilangnya rasa harga diri sebagai tuan tanah. Tiada lagi kebanggaan sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat. Sebagai misal, tokoh adat yang dulu amat disegani, kini – bersama dengan anggota masyarakat lainnya – mengais sisa-sisa kayu gergajian di tempat pembuangan sampah perusahaan kayu.

Perubahan ini rampaknya memang sulit terhindarkan. Boleh dikatakan, tidak ada suatu masyarakat suku yang dengan sengaja ingin meninggalkan adat yang telah mengayominya berabad-abad dari generasi ke generasi. Namun - bila memang saatnya tiba - tidak ada juga kelompok suku yang bisa menghindari diri dari perjumpaan dan interaksi, saling mempengaruhi dengan kelompok suku lain, yang pada gilirannya menghembuskan angin perubahan dalam masyarakatnya. Kalau toh pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menerima dan menghayati suatu tata nilai baru, kiranya itu bukan terutama terjadi karena keinginan subyektif melainkan lebih karena tuntutan zamannya. Siapa yang menuntut demikian? Realitas yang pluralistik dalam budaya modern menunjukkan bahwa tuntutan itu muncul dari situasi yang berkembang, dari sistem yang terbangun, anonim.

Tentu saja tuntutan riil kehidupan baru yang pluralistik itu tidak semuanya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif yang sering diungkapkan, terutama ialah semakin terbukanya relasi sosial antara sub-sub suku di Teluk Bintuni sendiri. Dulu mereka saling curiga, saling berperang satu sama lain, tapi sekarang situasi semacam itu sudah ditinggalkan. Namun hal yang agaknya perlu diwaspadai akhir-akhir ini ialah





gejala merenggangnya relasi antar etnis berkait dengan berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat – isu tentang pelanggaran hak ulayat dan ganti rugi tanah, transmigrasi, tersingkirnya kaum pribumi dari rasa bebas mengelola hutan, laut dan sungai, serta isu-isu politik “merdeka” yang sangat berpengaruh terhadap relasi antara etnis Papua dan non-Papua. Bila kita secara jernih membaca ungkapan-ungkapan ketidakpuasan dalam masyarakat, kiranya dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang bergaung luas dalam masyarakat bawah tersebut berkait erat dengan kecemburuan sosial yang berakar pada praktek-praktek kehidupan yang dirasa tidak adil.

Dalam hal hukum, gejala yang paling dirasakan ialah meredupnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Hukum adat yang dulu sangat berperan dalam mengatur segala segi kehidupan, sekarang menurun pamornya karena beberapa bagian yang fundamental dalam tata sosial masyarakat adat, telah diambil alih oleh hukum negara serta hukum Gereja/hukum agama. Dalam hal perkawinan, misalnya, orang baru merasa sungguh lengkap, bila mereka telah menikah secara Gerejawi/Islami dan mencatatkannya di catatan sipil. Kebanyakan orang memang menikah sah secara adat, tapi dalam pandangan masyarakat umum, mereka “baru” menikah adat, “belum” nikah secara Gereja/agama. Jadi, dirasa belum lengkap prosesnya. Contoh lain, menyangkut tindak kriminal, bila ada instansi kepolisian, seorang pembunuh yang tertangkap langsung diserahkan ke polisi, ditangani oleh polisi. Masalah pembunuhan bisa ditangani secara adat, hanya bila instansi kepolisian berkenan menyerahkannya pada lembaga adat. Jadi, meskipun adat lebih hidup dalam penghayatan masyarakat, namun dalam tata masyarakat yang baru ia hanya dianggap sebagai alternatif sekunder, pelengkap saja. Dari kenyataan ini muncullah suatu keprihatinan pada sementara kalangan akan masa depan hukum adat. Di satu pihak hukum negara dan agama ini dianggap sebagai hal yang baik dan perlu, namun tak urung muncul kekhawatiran akan terhapusnya peran hukum adat dari kehidupan.

Dalam tata hidup perkawinan dan keluarga ada beberapa perubahan yang cukup penting. Poligami yang dulu cukup umum, kini mulai berkurang dengan makin diterimanya monogami sebagai pola hidup berkeluarga lebih memungkinkan terwujudnya cinta kasih suami isteri. Demikian pun relasi antara suami isteri makin menampakkan kesejajaran, dalam arti mulai tumbuh suasana dialogis dalam menata hidup bersama. Gejala ini terutama nampak di kalangan pasangan muda yang cukup berpendidikan, seperti guru atau pegawai.

Namun demikian sejumlah hal masih juga menghantui keindahan hidup keluarga. Masalah yang menonjol dan sering menyebabkan retaknya hubungan dalam keluarga antara lain: sisa-sisa poligami, perzinahan, mulai



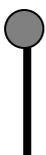


munculnya praktek pelacuran secara tersembunyi, serta kesulitan-kesulitan ekonomi sebagai akibat dari berbagai hal yang berkait dengan beberapa penyakit sosial seperti kecanduan akan alkohol, dan perjudian.

Dalam konteks yang lebih luas, yakni Papua, ada hal yang kiranya perlu dicatat berkait dengan kehidupan keluarga. Ada ketakutan yang agak sayup namun cukup sering terdengar dari kalangan kaum pribumi: penghapusan ras melalui hubungan perkawinan. Ketakutan semacam ini pada dasarnya tidak perlu, sejauh percampuran antar ras itu terjadi dalam relasi yang manusiawi, yang terwujud dalam hubungan perkawinan yang dilandasi cinta, sebagaimana normal terjadi pada setiap perjumpaan pria dan wanita di berbagai belahan dunia. Perkawinan antar etnis, antar agama semakin menjadi fenomena yang sulit dihindarkan. Pada dasarnya cinta manusiawi tak pernah mengenal batas-batas etnis atau pun ras. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat orang bersikap tertutup, selalu curiga. Sikap ini sama sekali tidak membantu dalam mendukung perkembangan sebagai manusia. Ada nilai yang lebih tinggi daripada sekedar ras, yakni nilai bersama sebagai makhluk manusia.

Dalam bidang pendidikan, memang tidak diperoleh data⁴ tentang adanya pendidikan kolektif tradisional yang diselenggarakan oleh lembaga adat (semisal inisiasi), kecuali dalam sub-suku Irirutu. Pendidikan umumnya lebih bersifat personal dan berlangsung dalam keluarga. Dalam hal ini peran orang tua, om dan tante menjadi sangat penting. Mereka – dulu – dapat dengan penuh keyakinan mengajarkan dan menasehatkan berbagai hal kepada anak-anaknya. Namun sekarang mereka tidak dapat melakukan tugas mulia tersebut dengan tingkat keyakinan yang sama. Peran mereka sebagai subyek pendidik bagi anak-anaknya tidak lagi dominan, karena ada guru, pastor, atau pembina asrama. Selain itu perubahan yang begitu cepat dalam masyarakat membuat tata nilai yang dulu diyakini dan dipegang sebagai kebenaran yang tak terbantah, sedikit demi sedikit digeser oleh tata nilai baru yang berkembang seiring perubahan masyarakat tersebut. Bahkan dalam sejumlah hal ‘terpaksa’ mesti belajar dari anak-anak mereka sendiri. Aspek perubahan tata nilai yang sangat menggelisahkan para orang tua umumnya berkait dengan perilaku seksual kaum remaja. Maraknya pornografi seiring dengan adanya TV dan VCD, serta munculnya perilaku seks bebas dan

⁴ Tidak diperolehnya data di sini tidak dimaksudkan sama artinya dengan tidak ada. Pada umumnya masyarakat arkhais-mitis sangat teguh menyimpan rahasia-rahasia adat yang dianggap fundamental bagi kelangsungan hidup sukunya, sehingga boleh jadi pendidikan tradisional itu sekarang-kurangnya pernah ada, namun mereka enggan menceritakannya, atau sejak lama tidak dipraktikkan lagi sehingga generasi yang sekarang memang tidak mengetahui adanya pendidikan adat tersebut





pelacuran terselubung karena iming-iming uang melalui jalan gampang, semakin menambah gundah kaum tua.

Dalam pendidikan formal, sekolah yang tersedia di desa-desa umumnya hanya SD. Tingkat yang lebih tinggi seperti SMP dan SMU hanya terdapat di kota kecamatan: Babo dan Bintuni. Semuanya terselenggara dalam suasana khas sekolah luar kota di negeri kita yang minim guru, minim fasilitas dan seterusnya. Untuk menempuh pendidikan tinggi, setidaknya mereka harus ke kota kabupaten: Manokwari, Sorong atau ke kota-kota lainnya. Di Bintuni ada kelas jauh sebuah Sekolah Tinggi di Manokwari, namun sekali lagi situasinya jauh dari memuaskan. Hal ini menyebabkan biaya untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang lebih bermutu sangat mahal. Selain itu, nampaknya, kesadaran akan pentingnya sekolah baru mulai tumbuh pada sebagian kecil anggota masyarakat. Itupun belum cukup diimbangi dengan kemampuan mengatur perekonomian. Akibatnya, banyak remaja dan kaum muda yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Pengaruh kepercayaan asli dalam kehidupan masyarakat masih sangat kuat pada kaum tua, sementara pada generasi muda, remaja dan anak-anak sedikit kurang tapi relatif masih cukup mewarnai peri kehidupan mereka. Namun dengan masuknya agama-agama baru, terutama Islam, dan Kristen, nampaknya aliran kepercayaan baru ini akan lebih berperan pada masa dan generasi mendatang.

Perubahan Sosial dan Penyesuaian Diri

Tak ada masyarakat manusia yang statis. Betapapun samar dan lambannya gerak itu, perubahan-perubahan senantiasa terjadi. Kodratnya sebagai makhluk berbudi secara potensial memang menjadikan dia selalu berada dalam keadaan menafsir, merefleksi dan mengevaluasi sejarah hidupnya. Terlebih bila menyangkut hal yang menyentuh pengalaman eksistensialnya – pengalaman-pengalaman yang menyentil dan menggerakkan dia untuk bertanya tentang ada dirinya, dan tempatnya dalam dunia. Inilah titik picu perubahan dalam masyarakat; dan pada dasarnya normal.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat itu menjadi masalah ketika apa yang berubah dalam tataran fenomenal tidak berjalan seiring dengan kemampuan beradaptasi para anggota masyarakatnya: terbentuklah jurang perbedaan antara nilai-nilai yang secara aktual sedang berlangsung dan nilai-nilai yang dihayati. Simbol-simbol dan ungkapan-ungkapan budaya yang sebelumnya akrab dengan kehidupan dan sungguh dihayati, meredup dan berganti dengan sesuatu yang terasa asing dan menimbulkan banyak pertanyaan serta kegelisahan. Yang muncul kemudian ialah perasaan kosong,





cemas: “apa yang mesti aku jadikan pegangan hidup?” Bila orang masih dapat melihat titik terang untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kecemasannya akan memudar, namun bila tidak, boleh jadi orang akan mengalami frustrasi; karena selalu merasa gagal, merasa tak mampu, kemudian menolak kenyataan dengan berontak atau mengundurkan diri. Gejala yang paling umum menanggapi rasa gagal dan frustrasi itu ialah bangkitnya kembali romantisme; kenangan akan masa lampau yang serba indah, kebencian akan masa kini yang dinilai serba ‘rusak’ sekaligus kebencian terhadap pihak yang dianggap merusak, dan tatapan risau akan masa depan yang suram.

Kenangan akan masa lampau yang serba indah – yang tak pernah bisa diulang kembali itu – biasanya terungkap dengan mundur dari pergaulan multi budaya dan berusaha mencari masyarakat sesuku, sekampung, guna memperoleh kembali lindungan primordialnya, atau kembali ke kampung halaman/dusun untuk menjauhkan diri dari segala yang tidak menyenangkan.⁵ Kiranya, inilah yang disebut sebagai guncangan budaya (*culture shock*).

Dari sisi pandang budaya, ada persoalan yang perlu dicermati. Kita sering melihat bahwa penyesuaian diri merupakan tuntutan yang “wajib hukumnya” bila orang ingin diterima dengan baik dalam suatu masyarakat atau dalam suatu tata kehidupan. Rasa diterima itu sendiri kemudian menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dipandang sebagai suatu kekurangan, rasa tak diterima dipandang sebagai suatu malapetaka. Namun, “apakah rasa ingin selalu diterima dan upaya untuk selalu menyesuaikan diri dalam segala situasi sendiri merupakan sesuatu yang wajar dan secara mental sehat?”

Erich Fromm dalam “Masyarakat yang Sehat” menjelaskan sebaliknya. Menurutnya, “Kebutuhan akan penerimaan adalah suatu perasaan yang sangat khas dalam pribadi yang terasing.”⁶ Ia mensinyalir bahwa kegembiraan karena merasa diri diterima itu tidak lain karena seseorang merasa selalu ragu apakah ia memang diterima. Rasa tidak diterima akan membuat dirinya goyah, rendah diri. Artinya rasa rendah diri itu berasal dari rasa berbeda, tanpa bertanya lebih lanjut apakah dengan berbeda ia memang lebih baik atau lebih buruk.⁷

Rasa ‘kurang’ bila merasa dirinya berbeda ini kiranya memang berakar pada kecenderungan umum mentalitas selalu mau menjadi bagian dari suatu

⁵ Erich Fromm menyebut gejala semacam ini sebagai wujud ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari ikatan inses dengan ibu. Bdk. Fromm, Erich. 1995. Masyarakat yang Sehat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, . 61.

⁶ Fromm, Erich, “Masyarakat yang Sehat”, *ibid.* h. 171.

⁷ *Ibid.*





rombongan. Orang sudah puas, senang apabila dia dapat menjadi bagian dan paket dari rombongan itu. Dan slogan bagus untuk itu ialah kebersamaan.⁸ Apabila orang terlalu terobsesi dengan keinginan ini sangat mungkin bahwa kebersamaan itu akan menjadi langkah pengerdilan bagi pribadinya, karena orientasi pengembangan sikapnya tidak lagi pada apa yang sewajarnya bagi dirinya, melainkan hanya apa yang seharusnya ia lakukan agar dianggap wajar bagi kebersamaan.

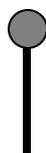
Bila kita simak realitas kehidupan dan coba membacanya dengan sorot pemikiran yang sedikit dalam, kita akan melihat beberapa titik perubahan fundamental yang cukup mengguncang baik tata masyarakat maupun peri kehidupan individual.

Secara umum, arus perubahan zaman sedang menarik mereka dari kehidupan tradisional yang bergantung pada kemurahan alam dan solidaritas bersama, beralih ke usaha mandiri. Banyak orang seolah dipaksa melompat sangat jauh, dari pola kehidupan yang apa adanya, santai menikmati, ke kehidupan yang penuh dengan syarat. Dalam tata hidup yang baru, orang harus bisa membaca dan menulis, harus tepat waktu, harus bekerja menurut jadwal, harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada orang lain, hidup dari upah dan sebagainya. Secara hitam putih, masyarakat yang nyaman tenang dalam budaya peramu, dilemparkan ke dalam tantangan untuk hidup dalam rutinitas dan ketelatenan bertani menetap, tantangan menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan di hadapan mesin-mesin kapal ikan atau alat-alat industri maju di perusahaan sagu, ikan, gas, kayu, dan sebagainya, baik yang mekanis maupun digital, serta tantangan untuk bersaing di era teknologi informasi. Perubahan-perubahan drastis itu sangat memungkinkan terjadinya frustrasi sosial dan guncangan budaya.

Selain itu, beberapa landasan penghayatan hidup juga berubah:

- Dari penghayatan hidup mitis ke kehidupan yang selalu menantang untuk berpikir logis. Dari tata hidup yang kental dengan warna religius ke tata yang penuh nuansa ekonomis materialis.
- Dari kesatuan yang intim oseanis dengan alam semesta, ke relasi inter-subyektif berjarak.
- Dari rasa memiliki harga diri dan rasa percaya diri, ke rasa serba kalah dan tertinggal dan tertindas.

⁸ *Ibid.* 176.





- Dari ketenangan hidup dalam masyarakat yang homogen suku sendiri, ke pluralitas budaya yang serba menantang. Dari relasi kekeluargaan dalam lingkungan primordial ke tata kehidupan penuh persaingan.⁹

Ini membuat gambaran tentang masa depan menjadi tidak serba jelas sebagaimana sebelumnya.

Tantangan dalam Perspektif Budaya

Realitas budaya dalam masyarakat di Teluk Bintuni kiranya dapat dicirikan sebagai suatu peralihan dari tradisionalitas ke modernitas. Beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap perubahan hidup masyarakat:

- Masuknya otoritas baru yang kemudian menjadi sangat dominan dalam membentuk struktur kemasyarakatan yang baru: pemerintahan dan agama.
- Masuknya para pendatang, terutama pedagang yang memperkenalkan tata ekonomi baru.
- Makin lancarnya transportasi antar daerah dan derasny arus informasi melalui sarana-sarana hiburan dan telekomunikasi.
- Munculnya generasi muda yang dibesarkan dalam pola pendidikan dan suasana yang berbeda.

Perubahan-perubahan ini selanjutnya memang – sebagaimana biasa - dipandang sebagai suatu bentuk kemajuan. Masyarakat tradisional yang ‘terbelakang’ sedang maju menuju ‘kemodernan’. Pemahaman ini kemudian mengantar orang masuk dalam buaian mitos tentang kemodernan yang menjanjikan aneka bentuk ideal dalam cita-cita peradaban. Buaian mitos baru ini selanjutnya mengantar masyarakat dalam suatu kompleksitas masalah yang tidak mudah dicerna dan dicari jalan keluarnya. Pertanyaannya, “Apakah segala perubahan yang dianggap sebagai ‘kemajuan’ itu memang sungguh suatu kemajuan yang mengantar manusia pada kemanusiawian yang lebih?” Kiranya kita memang memerlukan penjernihan akan makna kemodernan itu sendiri.

Sejarah peradaban memberi patok kelahiran zaman modern dengan salah satu ciri utama: dominasi rasionalitas atas dogmatisme, yaitu suatu kondisi ketika peri kehidupan manusia tidak lagi terperjara dalam ketundukan akan suatu wibawa tertentu, entah agama atau kuasa politis, ideologis atau

⁹ Seolah-olah gambaran Hobbes tentang *‘homo homini lupus’* sedang membayang di depan mata.





tradisi tertentu, melainkan dibimbing oleh kemampuannya untuk menilai situasi dan keberaniannya untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasionalnya.¹⁰ Urai kembang pemikiran modern selanjutnya merasukkan paham tentang kesadaran manusia akan tempatnya yang sentral dalam dunia dan penentu arah perkembangan kehidupan semesta. Perasaan terkurung dan ketundukan pada dogma-dogma diganti dengan kebebasan berpikir.¹¹ Di satu pihak paham ini sangat mendukung citra martabat dan harga diri manusia sebagai subyek, namun di lain pihak juga mengarahkan dinamika masyarakat dalam percabangan yang sangat kompleks dan pada kegamangan dalam pelaksanaan peran tersebut.

Bila kita membuat suatu perbandingan dengan proses budaya yang dialami oleh masyarakat Yunani ketika mereka meninggalkan pola berpikir mitis, ke suatu pola berpikir yang berbasis pada logos, atau peralihan dari ikatan tradisi feodal abad pertengahan ke kemandirian berpikir abad modern - yang disebut oleh para ilmuwan budaya sebagai proses pembebasan - dalam skala dan detail yang berbeda, proses yang sama kiranya juga sedang terjadi dalam masyarakat Teluk Bintuni, dan boleh dikatakan juga mengenai masyarakat lainnya yang sedang dalam transisi dari ketradisional ke kemodernan. Apakah kelepasan dari ikatan tradisi itu sungguh membawa orang masuk dalam kebebasan?

Mungkin saja di satu pihak orang - terutama kaum muda - memang merasakan suatu kelepasan dari belunggu tradisi, norma-norma dan tabu-tabu adat. Kehidupan yang sebelumnya dirasakan sebagai keterkungkungan dalam jerat tradisi, kini memberikan suatu perasaan mandiri, rasa mampu atau mungkin lebih tepat harus mampu menangani. Namun di lain pihak, bisa jadi ada yang merasakan dirinya bagai terlempar ke suatu padang rumput yang luas atau suatu rimba raya yang gelap dan menakutkan, yang selanjutnya mengantar mereka ke dalam perasaan sepi dan rasa terisolasi. Keakraban gaya hidup tradisional sedikit demi sedikit memudar, tuntutan untuk berusaha dengan kemampuan dan ketrampilan tertentu semakin dituntut, dan persaingan menjadi suatu pola interaksi baru yang mesti diterjuni. Sedikit banyak beberapa hal baru ini menimbulkan keraguan dan kecemasan pada mereka.

¹⁰ Dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan, orang menempatkan Rene Descartes (1596-1650) – seorang filsuf rasionalis Perancis - sebagai bapak pemikiran modern.

¹¹ Pendapat ini tentunya tidak sepenuhnya tepat, terutama bila kita mempertimbangkan munculnya banyak pemikir besar dalam bidang filsafat dan teologi, yang saling mengeritik dan melahirkan pemikiran-pemikiran mendalam dan sangat berpengaruh hingga kini. Katakanlah, pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat yang masih sangat berpengaruh dalam pemikiran etik, politik dan hukum.





Erich Fromm menulis bahwa kehidupan modern dengan motor penggerakannya: kapitalisme¹² mengantar kita pada suatu struktur masyarakat yang mempengaruhi manusia melalui dua cara secara bersamaan: entah ia menjadi makin mandiri, percaya diri, kritis, atau justru makin terisolasi, kesepian dan ketakutan.¹³ Kemungkinan pertama kiranya hanya bisa terjadi bila manusia mampu mempertahankan transendensinya terhadap realitas, sedang yang kedua, akan menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tidak mampu melihat lebih jauh dari sekedar kenyataan hidup.

Gejala umum yang nampak dalam masyarakat yang sedang berubah menampilkan sesuatu yang menarik: dua generasi dengan penghayatan hidup yang berbeda, sedang hidup bersama, atau dalam lingkup hidup yang berbeda: di kampung-kampung pedalaman, desa-desa pelosok, kota kecamatan, dan pemukiman-pemukiman pinggiran kota atau di tengah kota, berjalan beriring dengan pola pikir yang berbeda, kesadaran mental yang berbeda, pola kepribadian/karakter yang berbeda, penghayatan nilai yang berbeda. Semua ini tak jarang menimbulkan banyak benturan antara yang mau menggenggam tradisi dan yang mau melepaskannya. Ironi yang menyertainya ialah bahwa banyak dari mereka yang mau menggenggam tradisi tidak tahu pasti hal mana dari tradisi yang masih relevan dengan perkembangan zaman dan pantas dipertahankan, sehingga seringkali mereka hidup dalam suatu penghayatan nilai yang terasing dari lingkungannya. Sementara itu, banyak pula yang mau meninggalkan tradisi, belum memiliki bayangan yang cukup jelas akan nilai baru yang akan mereka pegang, sehingga hidup sekedar ikut arus saja tanpa suatu penghayatan nilai yang jelas. Kekaburan akan apa yang baik dan apa yang buruk menjadi salah satu ciri yang cukup menonjol.

Secara sederhana boleh dikatakan, tengah terjadi benturan antara tradisionalitas dan modernitas; lebih dari itu, sedang terjadi pergumulan juga dalam upaya menentukan nilai-nilai hakiki dalam lingkup tradisi atau pun kemodernan itu sendiri. Masalahnya ialah kebanyakan kita baru tiba pada tingkat upaya untuk membebaskan diri dari kekangan tradisi, dengan anggapan bahwa bila kekangan tradisi itu dihilangkan, manusia akan masuk dalam kebebasan. Padahal, itu hanya pembebasan dari salah satu bentuk kekangan, yakni kekangan dari luar diri, bebas dari penguasaan pihak lain. Selanjutnya, tantangan baru sedang menghadang: hilangnya pegangan, dan tiadanya kemampuan diri untuk menciptakan pegangan baru yang kuat,

¹² Tata ekonomi yang menekankan peran kapital (modal usaha), dan pasar bebas penuh persaingan. Tata ini berpengaruh luas ke lapangan politik, sosial dan budaya, di bawah bayang-bayang individualisme dan liberalisme.

¹³ Lih. Fromm, "Lari dari Kebebasan", 104.





sebagai dampak dari hadirnya penguasa baru kehidupan: otoritas tanpa nama (otoritas anonim) yang seringkali mempengaruhi dan menggiring peri kehidupan manusia tanpa ia sadari.¹⁴

Bila kita berkaca pada pemikiran Erich Fromm, kegamangan manusia dalam masa transisi dari tradisionalitas ke kehidupan kapitalistik modern memang terjadi karena hilangnya otoritas personal. Tak ada lagi tokoh yang secara dominan menjadi tolok ukur tindakan atau menjadi subyek ketundukan. Tak ada perintah personal yang secara jelas dapat dijadikan acuan. Yang kini harus ditunduki adalah 'sesuatu', dan sesuatu itu bisa banyak hal, entah hukum pasar, orientasi profit, kebutuhan ekonomis, pendapat umum, mode, dan sebagainya.¹⁵ Kegamangan ini bisa demikian kuat merasuki kehidupan mental seseorang hingga mengantarkannya dalam ketidakstabilan dan menjadi penghambat dalam upaya pengembangan diri.

Seiring dengan itu muncul ketakutan-ketakutan yang meruntuhkan mimpi-mimpi tentang kebebasan yang baru saja direngkuh. Kehidupan modern memang penuh dengan ketegangan-ketegangan. Kehidupan modern sangat dinamis. Segala sesuatu dapat berubah setiap saat, dan setiap perubahan menuntut setiap orang yang terlibat untuk mampu menyesuaikan diri sambil tetap mandiri. Sementara satu nilai belum dipegang dan dihayati, nilai lain telah muncul dan menawarkan diri sebagai acuan hidup.

Atas masalah penyesuaian diri tersebut, kita dihadapkan pada tantangan mengenai pentingnya kesadaran akan penemuan jati diri melalui pemahaman nilai yang positif dan pilihan bebas atas nilai yang dianut. Itu berarti orang tertantang bukan untuk berusaha menjadi seperti orang lain, bukan menjadi pribadi yang palsu, bukan menjadi makhluk yang tidak mampu lagi mengenal dirinya sendiri, melainkan menjadi 'aku' yang baru yang sungguh sadar akan adanya dan mengenal diri sebagai aku. Tolok ukur untuk itu ialah hati nurani. Seorang sewajarnya bertindak selaras dengan hati nuraninya.

Keharusan-keharusan yang memaksa seseorang hingga ia terpaksa bertindak tidak sesuai dengan hati nuraninya merupakan suatu penyakit mental yang tidak saja merusakkan diri tapi juga membuat tata sosial secara keseluruhan tidak sehat. Karena itu pentinglah untuk kembali kepada upaya 'mengetahui diri' dan upaya menemukan jati diri.

¹⁴ *Ibid.* 105.

¹⁵ Bdk. Fromm, "Masyarakat yang Sehat", 168–169. Inilah yang oleh Fromm disebut sebagai otoritas anonim.



Penyakit kronis yang banyak menjangkiti kehidupan manusia modern ialah bahwa kebanyakan orang cepat puas dengan apa yang nampak dipermukaan, apa yang sudah menjadi kebiasaan atau kelaziman dalam masyarakat luas. Kebanyakan orang tidak lagi merasakan penggalan makna hidup sebagai kebutuhan. Hidup hanya dipandang dalam perspektifnya yang partikular, dan kurang dilihat dalam keseluruhannya. Banyak orang telah kehilangan minat untuk bertanya dan menggali arti kehidupan dan kematian, penderitaan dan kebahagiaan, arti perasan dan pemikiran, yang pada hakekatnya merupakan cerminan realitas eksistensial manusiawinya. Akibatnya kebanyakan orang hidup sekedar menjalani kehidupan, tanpa mampu memberi arah pada hidupnya sendiri. Orang bisa merasa puas berada pada tataran artifisial saja.¹⁶ Pada titik ini – dari sudut pandang budaya – kiranya manusia menjadi tidak lebih dari sekedar benda atau makhluk yang tidak memiliki kekhasan martabat. Hanya ciri imanensinya yang nampak, tapi transendensinya ...? Akal budi kehilangan nilainya sebagai kemampuan manusia untuk memahami dan memberi arah pada kehidupannya. Akal budi kehilangan perannya sebagai jembatan terintegrasinya berbagai dimensi yang esensial dan yang aktual dalam kehidupan manusia.

Kehidupan yang berorientasi pada produktivitas material, umumnya memang mengantar kita pada peran akal budi yang bersifat parsial saja. Seolah tidak ada lagi tuntutan untuk memandang sesuatu dalam totalitasnya, padahal kecenderungan hakiki akal budi sebagai 'realitas rohani' adalah kepada yang tak terbatas, kepada totalitas. Betapapun mungkin orang tak pernah tiba pada pemahaman akan yang tak terbatas itu, toh tidak sewajarnya bila ia kehilangan orientasi tersebut. Kehilangan orientasi itu dapat disebut sebagai pengerdilan; dan ini nampak dalam sikap cepat puas, apa adanya saja, tak punya idealisme, puas bila berhenti di tengah jalan dan merasa tak perlu berjuang sampai ke tujuan. Dari kenyataan, hanya sedikit orang yang masih mampu berpikir kreatif, yang tidak mau terjebak dalam kehidupan yang bergaya 'otomatis' ala komputer yang segalanya sudah terprogram.

Tantangan yang menghadang dengan masuknya perusahaan dalam tata kerja masyarakat modern industrial dan sistem ekonomi pasar antara lain ialah perlunya ketrampilan khusus dan realitas kerja yang membebani, entah karena jenis pekerjaannya berat, atau pola kerjanya yang rutin, monoton dan membosankan, sehingga banyak orang bekerja bukan karena suka bekerja tapi karena terpaksa harus bekerja. Keharusan ini bisa karena tuntutan ekonomi, bisa juga karena tuntutan harga diri.

Pola kerja masyarakat industrial boleh dikata bersifat manipulatif. Orang dipaksa tenggelam dalam rutinitas. Dalam banyak hal, kreativitas justru

¹⁶ Bdk. Fromm, *ibid.*, 190.





ditabukan karena akan sangat mengganggu keteraturan. Di satu pihak ini dapat dianggap wajar karena mereka harus bekerjasama dengan orang lain, dan supaya kerjasama itu dapat terlaksana, semua harus tunduk pada suatu aturan bersama, dan mengikuti alur kerja yang tahap-tahapnya dapat dipahami bersama. Tidak boleh ada perubahan mendadak tanpa sepengetahuan yang lain, betapapun baiknya perubahan itu – karena hal seperti itu bisa mengacaukan kerja secara keseluruhan. Setiap orang harus memenuhi syarat-syarat keterampilan tertentu yang seragam bagi setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan yang sama. Namun dengan demikian, manusia masuk ke dalam pergumulan ‘bagaimana ia bisa merealisasikan potensi dirinya yang serasa terpenjara’. Tantangan ini kiranya tidak akan mudah bagi seorang dari akar budaya peramu yang dalam pola tradisionalnya menempatkan ‘pemanfaatan kesempatan, improvisasi dan momen keberuntungan’ sebagai gerak utama kehidupannya. Dapat dibayangkan bahwa akan banyak gejolak jiwa yang tersekat dan membutuhkan pelampiasan.

Masalah lain yang membuat banyak orang yang baru keluar dari tata tradisional sulit mengembangkan diri dalam tata kehidupan baru ialah saling ketergantungan yang amat besar dengan kelompok primordialnya; dan yang dimaksud bisa orang-orang yang terikat dalam hubungan darah, entah orang tua, kakek-nenek, saudara sekandung, sepupu, om, tante, atau bisa juga saudara ipar, se-klen, sekampung, atau lingkup yang cukup luas: sesuku. Keterikatan pada kelompok ini, pada tingkat tertentu, bisa berarti positif karena dalam primordialitas orang dapat mengenal diri dan saling mengenal dan mengembangkan satu sama lain. Selain itu, pada saat-saat tertentu orang memang membutuhkan dukungan dari orang-orang yang cukup dekat dengan dia. Orang membutuhkan dukungan dari mereka yang memiliki ikatan emosional. Namun akan menjadi negatif bila orang tidak mampu lagi membebaskan diri dari ‘belunggu primordial’ itu. Primordialitas bisa menjadi semacam jerat, yang membuatnya kehilangan kebebasan dan menghambat pengembangan potensi dan kekhasan diri. Ironisnya, seringkali justru dalam jerat itu manusia merasa dirinya hidup. Hal seperti ini biasanya terjadi karena rasa ragu yang menggelayut, apakah ‘aku’ bisa berjalan tanpa dukungan para saudara, kelompok primordialku.

Hal lain yang muncul seiring dengan kehidupan modern ialah budaya masal dan konsumsi masal. Sesuatu yang masal memang menjadi lebih mudah dan lebih murah. Selera yang ‘aneh-aneh’, seringkali sulit pemenuhannya, menimbulkan banyak kerepotan, dan mahal. Namun, bila kita menatapnya dari kaca mata lain, keberanian untuk berbeda dari yang lain dapat berarti juga bahwa seseorang itu memiliki individualitas, tidak serba ikut-ikutan. Asalkan, selera lain itu sungguh lahir dari kesadaran akan bernilainya



pluralitas selera, muncul dari kebutuhan riil, dan bukan asal mau lain dari yang lain.

Konflik dalam Dinamika Masyarakat

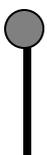
Sebagaimana kami urai pada bagian terdahulu, tantangan lain dari masyarakat yang sedang berubah ialah hilangnya rasa harga diri. Kebanggaan sebagai individu yang berperan, tenggelam dalam arus peradaban yang menempatkan manusia hanya sebagai satu komponen kecil dari sebuah mesin besar, atau sebatang perdu di hamparan padang rumput dan rimba yang luas.

Salah satu ungkapan kerinduan yang sering terdengar ialah keinginan menjadi tuan di negeri sendiri. Ungkapan ini sesungguhnya wajar saja bila diletakkan dalam konteks pemikiran politik, sebagai akibat rasa diekspansi dan dijajah oleh pendatang atau pengalaman pahit sejarah ketidakadilan yang menusuk ke relung hati. Ketidakpuasan ini semakin tumbuh di kedalaman hati dalam hasrat memberontak untuk merebut kembali kekuasaan yang terampas. Secara politis, gejala individual yang semakin menjadi pergumulan kolektif ini membutuhkan ruang pengungkapan yang lapang dan suasana pencarian jalan keluar yang adil dan bijaksana.

Masalah etis dan kemanusiaan akan muncul apabila rasa tertindas itu berujung pada keinginan untuk balik menguasai dan menindas mereka yang selama ini dianggap sebagai penindas.¹⁷ Masalahnya, bila itu yang terjadi, tata kehidupan tetap statis saja. Yang terjadi hanyalah pergantian peran, bukan suatu kemajuan. Dari sisi budaya tidak terjadi perkembangan. Mereka yang merasa tertindas balik menjadi penindas, sedang mereka yang sebelumnya dianggap menindas balik menjadi yang ditindas. Tata dan penghayatan nilai sebagai keseluruhan tidak berubah.

Dalam konteks perbedaan etnis atau ras, konflik pun sering terjadi, entah dalam arti 'ketegangan dalam diam' ataupun 'konflik terbuka'. Inti pemahaman tentang konflik seringkali diartikan sebagai 'siapa mesti menjadi tuan atas siapa'. Dalam situasi ini, orang diantar pada kerangka pandang kesubyeikan yang parsialistik: 'aku—engkau—dia', atau 'kami—kalian—mereka'. Cara pandang yang memisahkan ini bisa sangat positif dalam mencari jati diri, namun bila terlalu ditegaskan akan memecah-belah dan mengerdilkan orang dalam kesempitan individualisme atau primordialismenya, dan menganggap perbedaan sebagai ancaman. Sewajarnya pola pikir tersebut diperkaya dengan sudut kesubyeikan lain yang sesungguhnya merupakan bagian integral dari sudut-sudut kesubyeikan di atas, yaitu 'kita'. Rupanya paham ke-kita-an

¹⁷ Katakanlah 'politik balas dendam'.





tidak/belum menjadi bagian dari kesadaran sosial banyak orang, padahal kekitaan sebagai manusia, bernilai jauh mengatasi batas-batas individual, kesukuan, kebangsaan, keagamaan atau satuan-satuan primordial sejenis yang seringkali (tidak selalu) mengurung, dan mengerdilkan.

Kebanyakan orang sering hanyut dalam kerangka pikir dialektis yang tidak lengkap. Pemahaman tentang hakikat konflik pun seringkali sempit. Bagi banyak orang, konflik diartikan sebagai tindakan vulgar konfrontatif guna mengambil alih kekuasaan dari pihak lain, dan balik menguasai. Secara hitam-putih dapat digambarkan demikian: ada kecenderungan, bahkan keyakinan bahwa sangat penting, untuk menentang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat atau keinginan pribadi ('aku, kami'). Kemudian, segala yang tak sesuai dengan pendapat dan keinginannya itu harus dimusnahkan dan diganti dengan yang 'aku' atau 'kami' kehendaki. Bila tidak terlaksana maka 'dia' atau 'mereka' yang mengemukakan pendapat yang berseberangan dengan pendapatnya itulah yang harus dihapuskan keberadaannya. Yang dilupakan di sini ialah dimensi kritis untuk masuk ke dalam suatu tahap kebenaran yang lebih tinggi dari yang sebelumnya: yang merangkum kebenaran yang ada pada pihak yang dikritik maupun pada pihak yang mengkritik.¹⁸

Kemajuan dalam tata budaya tak bisa bertolak dari rasa suka dan tidak suka semata; lebih dari itu, tidak bisa berangkat dari sikap mau mengaparkan pihak lain. Konflik sekedar demi konflik itu sendiri, atau konflik demi kejayaan personal tak pernah menghasilkan suatu tata budaya yang lebih maju; justru sebaliknya akan mengantarkan pada kehancuran. Keberbudayaan justru terukur dari kemampuan kita mengelola konflik dalam perspektif menemukan suatu nilai yang lebih tinggi, pola relasi yang lebih manusiawi; suatu pertentangan yang dikelola secara dialogis, kritis, rasional, dalam suasana di mana setiap pihak menginginkan suatu keadaan yang lebih baik, bukan suatu kemenangan sekedar demi kemenangan semata.

Dalam lingkup politik, pemahaman yang dangkal akan makna kekuasaan dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik secara rasional, berdampak sangat besar terhadap tata hidup bersama dalam masyarakat, sekaligus juga menempatkan negara yang idealnya ada sebagai pengayom, kehilangan kekokohan dasar pijaknya. Pemerintah republik ini memang sedang menghadapi tantangan berat: kegamangan dalam menangani masalah sosial

¹⁸ Dalam kerangka dialektika Hegel, suatu pertentangan kebenaran (tesis dan antitesis) mesti mengarah pada suatu bentuk kebenaran baru di mana segala yang benar pada masing-masing (tesis dan antitesis) diangkat, sedang segala yang tidak relevan atau tidak benar ditinggalkan. Kebenaran baru yang diperoleh itu (sintesis) bernilai lebih tinggi dari dua bentuk kebenaran yang terdahulu, karena memang lebih benar.





secara adil dan arif, yang berbuntut pada makin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kinerja aparat pemerintahan. Pemerintah sering tidak lagi dirasakan sebagai pengayom dan penyelenggara kehidupan masyarakat yang adil, melainkan justru ancaman. Merupakan kenyataan yang sangat ironis dan memprihatinkan bahwa kehadiran polisi, brimob, atau pun aparat TNI ditanggapi dengan sikap takut dan was-was oleh masyarakat. Padahal, sewajarnya kehadiran penegak hukum dan pembela negara justru analog dengan hadirnya rasa aman, rasa terlindungi. Dalam konteks ini kiranya penting untuk bertanya tentang legitimasi pemerintah di mata rakyatnya. Pertanyaannya, “Apakah setelah lebih dari 40 tahun mengklaim Tanah Papua sebagai wilayahnya dan Rakyat Papua sebagai warga negaranya, pemerintah republik ini secara aktual telah memperoleh legitimasi yang cukup kuat dan luas dalam masyarakat?”

Sebelum menjawab pertanyaan itu, paham tentang legitimasi perlu sedikit dijernihkan.

Magnis Suseno mengartikannya sebagai kesediaan rakyat untuk mengakui wewenang negara sebagai suatu sistem kekuasaan yang *de facto* bertanggung jawab mengatur masyarakat dan menetapkan norma-norma kehidupan rakyatnya. Catatan penting lain ialah bahwa kewenangan negara itu tidak sama artinya dengan membolehkan negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dengan kata lain tindakan negara harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum, sosial, maupun secara moral.¹⁹

Menurut Habermas, legitimasi ialah adanya argumen-argumen yang baik bagi suatu klaim tata politik agar dapat diakui sebagai tata yang benar dan adil. Legitimasi berarti adanya pengakuan, dan pengakuan berarti suatu evaluasi yang berkait erat dengan keadilan dan mengindahkan situasi. Salah satu konsekuensi penting legitimasi ialah stabilitas. Stabilitas bukan dalam arti terjaminnya *status quo*, melainkan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan ketegangan dan perubahan-perubahan yang dihadapi.²⁰

Habermas tidak memaksudkan legitimasi sebagai situasi di mana opini publik secara luas mendukung hak-hak dan kekuasaan negara. Ia memusatkan perhatian pada persoalan, apakah klaim-klaim negara secara luas bersifat memaksa atau tidak, memiliki wibawa atau tidak. Boleh jadi, klaim-klaim itu efektif tapi tidak benar, atau benar tapi tidak efektif, atau mungkin klaim-klaim itu hanya menarik bagi kelompok tertentu tapi tidak bagi masyarakat umum. Bagi Habermas, suatu pernyataan negara – dan dengan demikian juga klaim-klaimnya – mengenai hak-hak negara untuk menggunakan kekuasaan

¹⁹ Lih. Magnis-Suseno, “Etika Politik”, 172-178.

²⁰ Lih. Wuthnow, Robert, dkk., “Cultural Analysis”, 217.





merupakan salah satu bentuk tindakan berbicara. Dalam hal ini, keabsahan pernyataan-pernyataan itu terutama mengacu pada apakah klaim itu secara tepat berkait dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau tidak, dan apakah klaim itu dilakukan sungguh atas nama masyarakat atau tidak. Negara sebagai subyek pengayom, bertugas menjamin kelangsungan hidup masyarakat melalui keputusan-keputusannya. Hal terakhir inilah landasan penting bagi klaim negara untuk berkuasa. Dengan kata lain, hak negara untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat, berakar pada kemampuannya untuk mencegah disintegrasi sosial. Namun pemahaman akan disintegrasi tergantung juga pada nilai-nilai kolektif. Karena itu, legitimasi negara akhirnya tergantung juga pada budaya.²¹ Habermas memang sedikit memberi titik berat mengenai legitimasi dan integrasi sosial, pada pentingnya nilai-nilai mutlak yang berakar pada tradisi. Namun demikian, ia kurang berkenan dengan penghidupan kembali arti tradisional agama dan simbolisme patriotik dan lebih cenderung pada mengedepankan pemahaman mengenai peran komunikasi rasional dalam proses politik.²²

Argumen Habermas tentang legitimasi ini terarah pada negara modern. Dalam masyarakat tradisional, pertanyaan yang muncul ialah mengenai hak negara untuk menggunakan kekuasaannya. Namun, pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengacu pada pemahaman keagamaan atau pandangan dunia (falsafah hidup) mereka mengenai nilai-nilai mutlak. Konflik politik umumnya dapat dipecahkan melalui gerakan-gerakan mesianis atau kenabian, dengan menegaskan nilai-nilai baru sebagai sumber legitimasi. Sebaliknya, negara modern – dan dengan demikian masyarakat modern – menggantungkan legitimasinya pada norma-norma prosedural mengenai legalitas dan konstitusionalitas keputusan.²³ Ironisnya sebagai negara dan masyarakat kita yang sering mengklaim diri sebagai negara dan masyarakat modern, kita belum secara konsekuen mewujudkan norma-norma kehidupan yang legal, konstitusional, yang berdasar pijak pada suatu proses politik yang komunikatif rasional.

Dalam kenyataan seperti ini, jalan yang perlu dirintis: keterbukaan hati dan budi kita bersama, serta upaya terus-menerus membangun tata kehidupan di mana wajah dominasi semakin asing, dengan mengembalikan makna hakiki paham kekuasaan. Kekuasaan politik sejatinya ialah kewenangan untuk menata kehidupan bersama demi kesejahteraan semua orang yang berada di

²¹ *Ibid.*, 218.

²² *Ibid.*, 219.

²³ *Ibid.*, 218-219.



bawah pengayomannya; bukan kekuasaan demi penguasaan. Legitimasi rasional demokratis rakyat memang membutuhkan sejumlah syarat normatif – seperti: menegakkan hukum demi mewujudkan keadilan serta terbukanya kemungkinan untuk hidup bebas dan sejahtera – dan itu hanya mungkin bila kekuasaan bermakna pelayanan yang berlandaskan kasih.

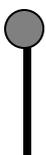
Penutup

Masyarakat tradisional yang hidup tenang dalam lindungan alamnya ini sedang berproses melepaskan diri dari ikatan primordialnya. Masuknya para pendatang dengan tata sosial dan tata ekonomi baru mengantar mereka pada suatu pola hubungan yang lain dengan alam dan sesama.

Dalam relasi dengan alam, lahir pemahaman bahwa alam bukan lagi sesuatu yang hanya perlu diakrabi, tapi bisa juga dieksploitasi. Di sini pola hubungan mulai berubah, manusia tidak lagi memandang dirinya sebagai makhluk dilingkupi oleh kuasa semesta, tapi sebagai subyek yang otonom berhadapan dengan alam, subyek yang mampu mengolah, bahkan mengatasi alam. Manusia bebas dari kungkungan kuasa alam yang bersifat mitis yang membuatnya tergantung padanya.

Dalam relasi dengan sesama, homogenitas suku sendiri tengah dihadapkan pada pluralitas multi budaya. Di samping optimisme kemajuan, rupanya terurat juga kekhawatiran, terutama berkait dengan perubahan perilaku kaum muda, perubahan tata masyarakat dan struktur kekuasaan, berbagai pergeseran nilai yang dianggap bertentangan dengan tradisi, serta makin teralihkannya hak mereka atas kekayaan alam yang mereka warisi dari nenek moyang.

Tantangan bagi kehidupan yang lebih sejahtera dan manusiawi tengah menghadang, dan ini menuntut sumbang pikir kita bersama. Tata dalam masyarakat yang plural memang menuntut keterbukaan untuk saling menerima satu sama lain dan komitmen membangun kehidupan bersama. Kiranya, arah pengelolaan masalah ini perlu menempatkan landas pijaknya pada pergaulan antar budaya yang setara, adil dan senantiasa terarah pada 'tata nilai yang lebih baik' dalam kebersamaan dan cinta persaudaraan.





Kepustakaan

- Fromm, Erich. 1999. *Lari dari Kebebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 1995. *Masyarakat yang Sehat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laeyendecker, L. 1991. *Tata, perubahan, dan Ketimpangan – Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. *Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahasiswa-mahasiswi STFT Fajar Timur Angkatan 1999. 2001. *Sikap Umat Katolik Pribumi di Teluk Bintuni terhadap Berbagai Perubahan yang Dialaminya*, (laporan penelitian), Abepura: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur.
- Oberg, Kalvero. 1990. “Gegar Budaya dan Masalah penyesuaian Diri dalam Lingkungan Budaya Baru”, dalam Mulyana, M.A., Drs. Dedy, dan Drs. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. (ed.), *Komunikasi antar Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 162-164.
- Russell, Bertrand. 1977. *Roads to Freedom*, London: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd.
- Schweitzer, Albert. 1959. *The Philosophy of Civilization*, translated by C.T. Campion, New York: The Macmillan Company, Chapter 12, 13.
- Simanjuntak, SH, Drs. B. 1985. *Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Wuthnow, Robert, James Davison Hunter, Albert Bergesen, Edith Kurzweil. 1984. *Cultural Analysis – The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen Habermas - Phenomenology, Cultural Anthropology, Neo-Structuralism, Critical Theory*, London: Routledge & Kegan Paul.